

JURNAL CYBER PR
Fakultas Ilmu Komunikasi
Univesitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

**Program *Jakarta Open Data* Sebagai E-Government Dalam Pelayanan
Informasi Publik Humas Pemprov DKI Jakarta**

**Farhan Dewangga, Prasetya Yoga Santoso, Rialdo Rezeky M. L. Toruan*, Dwi Ajeng
Widarini, Ani Kardi Wiyati**

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jl. Hang Lekir I No 8, Gelora, Jakarta Pusat, Indonesia
*Email koresponden: rialdo@dsn.moestopo.ac.id

Abstract - *The policies carried out by the DKI Jakarta Provincial Government in the service of public information disclosure as mandated by Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. Implementation of information disclosure in DKI Jakarta Province, a region that has a very strategic position and role in implementing the Public Information Openness Law. The purpose of this study is to find out how the implementation of the Jakarta Open Data program by the DKI Jakarta Provincial Government Public Relations. This research uses a case study method with constructivism paradigm. The object of this research is the field of Public Relations of the DKI Jakarta Provincial Government and Public Information Experts as the organizer of the program. Data collection techniques were carried out through observation and interviews. The technique of checking the validity of the data is done through triangulation of sources. The results of this study are that in order to make the City of Jakarta a Smart City, an open data portal was created that presents data from the City of Jakarta in an accountable and transparent manner in order to increase public trust in the government. The implementation of the Jakarta Open Data program policy can be seen from the work of the DKI Jakarta Provincial Government Public Relations which is able to provide information openly about the programs and policies of the DKI Jakarta Provincial Government.*

Keywords: *e-governmnet; public information; open data; government public relations*

Abstrak - Kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pelayanan keterbukaan informasi publik sebagai amanah dari Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi keterbukaan informasi di Provinsi DKI Jakarta, daerah yang memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program Jakarta Open Data oleh Humas Pemprov DKI Jakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan paradigma konstruktivisme. Objek penelitian ini adalah bidang Humas Pemprov DKI Jakarta dan Tenaga Ahli Informasi Publik sebagai pelaksana program tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah dalam rangka mewujudkan Kota Jakarta menjadi *Smart City*, maka diciptakanlah portal open data yang menyuguhkan data dari Kota Jakarta secara akuntabel serta transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Implementasi kebijakan program *Jakarta Open Data* dapat dilihat dari hasil kerja Humas Pemprov DKI Jakarta yang mampu memberikan informasi secara terbuka tentang program dan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta.

Kata Kunci: *e-government; informasi publik; open data; humas pemerintah*

PENDAHULUAN

Pemprov DKI Jakarta telah membuat kebijakan sistem Open Data terkait dengan sistem pelayanan dalam informasi publik. Pelaksanaan keterbukaan layanan informasi publik dapat diwujudkan melalui *program Jakarta Open Data*. Dilansir dari laman *website Jakarta Open Data*, dapat diketahui bahwa *Jakarta Open Data* merupakan salah satu program dari Pemprov DKI Jakarta berbentuk Portal Data Berbasis Terpadu yang menyediakan berbagai data dari keseluruhan Unit Kerja Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, *Jakarta Open Data* juga dianggap sebagai cikal bakal dari cita-cita dan impian Pemprov DKI Jakarta guna menyajikan sebuah basis data pembangunan dengan pelayanan yang cukup valid, terbuka, serta terintegrasi. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 181 Tahun 2014.

Diberlakukannya kebijakan baru *Jakarta Open Data* tersebut lebih ditujukan pada keterbukaan layanan informasi publik yang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya portal data *Jakarta Open Data* ini, maka diharapkan platform berbasis online atau web tersebut dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang interaktif antar pejabat pemerintah supaya semua informasi atau pesan mengenai layanan informasi publik dapat tersampaikan pada masyarakat secara lebih efisien dan efektif.

UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sebuah badan publik yang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2008 wajib memberikan atau menyajikan berbagai informasi layanan publik di bawah naungan pemerintah kepada pihak pemohon informasi layanan publik, dimana informasi yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, badan atau lembaga publik wajib menyajikan layanan informasi publik secara lebih valid dan akurat, dimana kemudian oleh Pemprov DKI membuat sebuah sistem yang disebut e-government dengan nama *Jakarta Open Data*.

Tata kelola Pemerintahan yang baik merupakan keinginan dari setiap warga Negara. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah tujuan bersama, dengan terwujudnya hal tersebut maka dapat dipastikan akan menurunkan angka korupsi dan maladministrasi. Selain itu pemerintahan yang baik dan sehat juga akan meningkatkan kepedulian terhadap kepentingan warga. Menurut (Siti Maryam, 2017), pelayanan publik adalah salah satu layanan pemerintah dengan memberikan jasa publik, baik dari pihak swasta pemerintah maupun masyarakat.

Adapun bentuk dari sistem pelayanan informasi publik yang dianggap mudah dan efisien untuk dikembangkan yaitu web, dimana semua sistem informasi yang dipublikan pada web tersebut dapat digunakan sebagai penyedia informasi dan dapat pula digunakan untuk melakukan dialog dengan data, sehingga dapat memberikan sebuah informasi atau pesan dalam pengambilan keputusan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tujuan utama dari pembuatan sistem informasi pada umumnya yaitu untuk memberikan kelancaran dalam melakukan administrasi, menghemat biaya maupun waktu, serta mengurangi tenaga yang digunakan.

Adapun penerapan dari keterbukaan sistem layanan informasi publik di Pemprov DKI Jakarta yang dirasa bahwa daerah tersebut mempunyai posisi, fungsi, serta peran yang sangat penting dalam mewujudkan UU Keterbukaan Sistem Layanan Informasi Publik. Adanya hal tersebut dilandasi atas pertimbangan dan keputusan bahwa Pemprov DKI Jakarta mempunyai problematika yang sangat kompleks jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan Indonesia, seluruh keputusan atau kebijakan yang telah dibuat dan diatur akan sangat mempengaruhi provinsi lain yang ada di Indonesia. Terlebih lagi dalam hal penerapan UU Keterbukaan Sistem Layanan Informasi Publik. Maka dari itu, perubahan dan dinamika dari UU tersebut dapat ditelusuri dengan cara memotret atau mencari tahu tentang yang sebenarnya terjadi di Pemprov DKI Jakarta saat ini.

Menurut Bank Dunia, *E-Government* adalah ketika pemerintah ingin membangun sebuah relasi dengan masyarakat, dunia usaha, serta instansi pemerintah lainnya dengan memakai teknologi informasi yang meliputi *Wide Area Network (WAN) internet, mobile computing*. Sementara menurut Depkominfo, mengartikan *E-Government* sebagai sarana pelayanan publik yang menggunakan *website* milik pemerintah dengan domain pemerintah Indonesia (*go.id*). Berdasarkan pemikiran (Sosiawan, 2015), pada konteksnya *e-government* adalah *e-government refers to the processes and structures pertinent to the electronic delivery of government services to the public*.

Karena visi tersebut berlandaskan prinsip “dari, oleh dan untuk” masyarakat atau kelompok dimana E-Government tersebut diimplementasikan, maka masa waktunya akan sangat berpegang pada keadaan dan situasi masyarakat tersebut. Seperti penjelasan sebelumnya, *e-government* merupakan sebuah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet supaya lebih efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya *e-government* maka diharapkan tatanan sistem dan kinerja di lingkungan pemerintahan dapat dilakukan melalui teknologi informasi.

Penyelenggaraan dalam mengembangkan *e-Government* dilaksanakan untuk memenuhi 4 (empat) tujuan utama, (Inpres No.3 Tahun 2003, 2016) yaitu: 1) Pembuatan jaringan informasi dan kegiatan pelayanan publik dengan kualitas yang baik dan cakupan yang luas serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat di wilayah Indonesia tanpa batasan waktu dengan biaya yang murah; 2) Pembuatan jaringan yang interaktif terhadap dunia bisnis untuk mengoptimalkan pengembangan ekonomi negara dan memperkuat kemampuan dalam menyambut perubahan dan kompetisi dalam perdagangan dunia; 3) Pembuatan cara kerja dan jaringan komunikasi terhadap lembaga pemerintahan serta pengadaan fasilitas komunikasi publik sebagai sarana masyarakat agar dapat ikut serta dalam merumuskan kebijakan negara; 4) Pembuatan sistem pengelolaan dan tahapan kerja yang transparan dan efektif serta melancarkan transaksi dan pelayanan antara lembaga pemerintahan dengan pemerintah daerah otonom.

Konsep *E-Government* diterapkan untuk mengimbangi perkembangan zaman serta pergerakan masyarakat yang dinamis, sehingga pemerintah dapat tetap menyesuaikan pelayanannya dengan kondisi publik terkini. *E-government* juga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, serta tercapainya predikat *good government* atau pemerintah yang baik.

Kemajuan teknologi informasi telah merubah tatanan kehidupan masyarakat dari masyarakat industri menjadi masyarakat yang berbasis pengetahuan. Kemajuan teknologi informasi ini juga mendorong pemerintah untuk selalu menampilkan inovasi terbaru dalam melaksanakan pelayanan publik, pelayanan juga menjadi lebih transparan, terintegrasi, interaksi, serta imajinatif.

Dalam hal ini, Humas Pemerintah memegang peranan penting setelah era reformasi, bahkan cara kerja tradisional berubah menjadi digital. Peran Humas Pemerintah khususnya setelah era reformasi yang semakin berkembang menjadi sangat penting. Masyarakat menuntut adanya transformasi informasi dari Pemerintah, sekaligus berperan besar sebagai komunikator pemerintah guna menyebarkan informasi ke seluruh stakeholder pemerintah.

Peran Humas Pemerintah dalam (RI, 2011) adalah sebagai komunikator yakni membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan, berperan sebagai fasilitator, diseminator, katalisator, konselor, dan prescriber.

Humas Pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah seperti termaktub dalam poin a. pasal 3 Permendagri 13/2011, merupakan ruh dari metode public relations pada level organisasi

manapun. Keberadaan PR merupakan komunikator lembaga terhadap masyarakat umum sebagai publiknya. Adapun kebijakan, program dan kegiatan pemerintah merupakan pesan aktivitas PR, dalam (Sani, Hidayat, & Sjafirah, 2020).

Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Pertemuan Tematik Kehumasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta mengungkapkan jika terdapat perbedaan antara Peran Humas dahulu dengan sekarang. Media sudah lebih transparan dalam memberikan informasi pada publik berbeda dengan dahulu sebelum reformasi yang semua dikendalikan oleh Pemerintah (Kominfo, 2016). Perubahan wajah humas pemerintah dari yang cenderung 'tradisional' menjadi lebih 'modern' itulah kesan yang menyeruak dari Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Bahwa Humas Pemerintah harus menjadi fasilitator, diseminator, katalisator, konselor dan prescriber. Dengan kata lain sejak lengsernya era pemerintahan Orde Baru yang otoriter merangsang tumbuhnya kekuatan civil society sehingga terbukanya saluransaluran komunikasi yang dulu tersumbat. (Sani, Hidayat, & Sjafirah, 2020).

Melihat pentingnya peran Humas pada Pemerintah, praktisi PR harus menguasai peran Humas Pemerintah. (Astuty, Maulina, & Hanief, 2017) menjelaskan hasil dari penelitiannya adalah jika SDM praktisi Humas minim latar belakang PR, maka mungkin saja menjadi penyebab terdapat praktisi Humas yang hanya terbatas pada menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi dan teknisikomunikasi. Data tersebut di atas perlu diminimalisir dengan peningkatan mutu praktisi Humas Pemerintah di tengah transformasi peran Humas Pemerintah. Humas Pemerintahan bertransformasi menjadi Humas yang modern salah satunya dengan mengadopsi konsep Humas sebagai koalisi dominan dalam organisasi.

Humas harus terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memutuskan perencanaan strategik. Upaya menyebarluaskan informasiinformasi pemerintah ke seluruh stakeholder, menjadi sulit bagi pejabat Humas pemerintah, jika akses terhadap sumber informasi pemerintahan terhambat oleh sekat-sekat birokrasi. Sekat-sekat ini harus diruntuhkan dengan menempatkan pejabat Humas pada tingkatan dalam struktur organisasi yang lebih strategis.

Pengertian informasi publik diutarakan oleh beberapa ahli yaitu menurut Fakhri dan Lawati (2019:3) dalam jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan, Informasi publik merupakan hak dasar yang disebarkan kepada masyarakat dan harus dipenuhi oleh lembaga publik. Menurut Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Menurut Retnowati (dalam Pratama & Ari, 2021) keterbukaan informasi adalah salah satu prasyarat penting dalam pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi dan akuntabilitas layanan public dapat terjamin berdasarkan kemampuan public mengakses informasi publik. Hak untuk mengakses informasi adalah hak asasi manusia, dan publikasi informasi publik adalah salah satu fitur utama dari rekam jejak yang baik, dan bahwa pengungkapan informasi publik merupakan sarana untuk membuat pengawasan publik dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan publik dapat berjalan dengan optimal.

Dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterbukaan informasi publik, masyarakat juga diberikan kesempatan dalam ikut andil dalam mengontrol kebijakan publik yang ada dengan adanya keterbukaan informasi publik ini. Pemerintah menjadi lebih transparan serta akuntabel karena adanya kontrol dari masyarakat, sehingga mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah. Dengan adanya jaminan dalam

undang-undang bahwa informasi yang dikelola badan publik menjadi informasi yang dapat diakses secara umum oleh masyarakat (*transparency international*), berarti memastikan bahwa pemerintah semakin terbuka dan demokratis.

Pada penelitian ini, digunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan referensi untuk menyelesaikannya. Penelitian pertama judul Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2013 yang dilakukan oleh (Hikmat, 2013) mengkaji tentang kualitas implementasi peraturan perundang-undangan KIP yang dilakukan oleh Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa angket observasi terhadap pemenuhan kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya, dimana pada penelitian tersebut lebih difokuskan pada implementasi peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, sedangkan pada penelitian saat ini lebih ditujukan pada implementasi program kebijakan *Jakarta Open Data* dalam pelayanan informasi publik.

Penelitian kedua dilakukan oleh Mega Ardina dan Erni Saharuddin dengan judul Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul bertujuan untuk mengetahui implementasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Kabupaten Bantul dengan fokus penelitian pada penyebarluasan informasi publik menggunakan website resmi. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui penilaian pada konten website dan dilakukan observasi serta wawancara. (Ardina & Saharuddin, 2021).

Hasil penelitian ini berupa presentase rata-rata implementasi keterbukaan informasi dari beberapa badan publik di Kabupaten Bantul yang menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana untuk akses informasi publik sudah memadai. Terdapat sedikit perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian adalah Badan Publik di Kabupaten Bantul, sedangkan objek penelitian penulis pada program *Jakarta Open Data* di DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi *Jakarta Open data* dalam mendukung keterbukaan informasi publik, serta penulis ingin memperdalam pengetahuan mengenai keterbukaan informasi publik khususnya *Jakarta Open data*.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Pandangan konstruktivisme ini lebih difokuskan pada pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dapat dijadikan sebagai suatu hasil konstruksi atau usaha dari seseorang tersebut yang dilakukan melalui interaksi atau hubungan antara objek penelitian dengan pengalaman dan lingkungan sekitar (Paradesa, 2015).

Digunakannya paradigma ini, karena peneliti menganggap dengan menggunakan berbagai pendekatan melalui subjek akan mendapatkan banyak informasi dan data-data yang seobyektif mungkin sehingga sesuai yang dibutuhkan untuk mengetahui implementasi program *Jakarta Open Data* terhadap pelayanan informasi publik melalui e-government.

Metode Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Kebaruan dalam penelitian ini adalah adanya pemahaman petugas kehumasan tentang peran humas pemerintah di Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini tergolong satu obyek (*single case study*), karena penulis akan melakukan penelitian terhadap satu kasus. Keunikan dalam tema penelitian ini adalah dimana Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 181 Tahun 2014 merupakan salah satu peraturan sebagai turunan dari Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi

Pemerintah yang mencoba untuk menerapkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terkait peran humas di dalam lingkungan lembaga mereka. Esensi penguatan peran humas Pemprov DKI Jakarta secara internal kemudian menjadi menarik karena sesuai dengan nilai humas sebagai salah satu peran manajemen sebuah lembaga.

Penelitian ini menentukan key informan yang akan menjadi narasumber bagi pengumpulan data yang dipilih secara purposif. Teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan rasional peneliti bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi atau data sebagaimana diharapkan peneliti. Informan dipilih sebagai narasumber karena peneliti menganggap bahwa informan tersebut memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Informan yang berasal dari pelaksana peran Humas Pemerintah di instansi Pemprov DKI Jakarta dianggap tepat oleh peneliti untuk memberikan data yang relevan karena melaksanakan peran humas pemerintah secara langsung dan dapat memberikan data yang mendalam.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam. Data wawancara ini merupakan data utama dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder adalah data dari sumber lain yang mendukung penelitian ini, misalnya studi pustaka, dokumentasi dan referensi lainnya, yang akan memperkaya data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *E-Government* Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Adanya e-government mempermudah sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga dapat menunjang kegiatan pemerintah provinsi dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat maupun pihak swasta. Pelaksanaan e-government ini juga sudah diterapkan oleh Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 181 Tahun 2014.

Dalam *Jakarta Open Data* sendiri berisikan data-data terkait informasi yang diperlukan oleh masyarakat, tercantum dalam laman website *Jakarta Open Data* terdapat 1932 data set yang dapat diakses oleh masyarakat. Data tersebut berisikan produksi data dari setiap daerah, dinas, maupun badan yang terkait dengan kinerja dan hasil pekerjaan mereka sehingga masyarakat mampu mengaksesnya dengan transparan. Apabila terdapat data-data yang belum tampil dalam portal open data, maka masyarakat dapat meminta data tersebut terhadap pihak terkait. Hal ini berdasarkan keterangan Bapak Satrio selaku Koordinator tenaga ahli *Jakarta Open Data*.

Dalam pelaksanaan *Jakarta Open Data* ini terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung merupakan faktor yang memberikan dukungan terhadap keberlangsungan open data, sementara faktor penghambat merupakan faktor yang bersifat menggagalkan suatu hal atau menghambat keberlangsungan open data tersebut. Faktor-faktor tersebut disampaikan melalui keterangan Bapak Ryan selaku Tenaga ahli *Jakarta Open Data*.

Dalam rangka mewujudkan Kota Jakarta menjadi Smart City, maka diciptakanlah portal open data yang menyuguhkan data dari Kota Jakarta secara akuntabel serta transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Open data berarti memberikan akses masyarakat untuk dapat melihat data dengan seluas-luasnya agar dapat dimanfaatkan oleh publik, serta pemerintah ingin memberikan gambaran tentang kinerja pemerintah selama ini. Open data selain dapat memudahkan pekerjaan pemerintah, hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, salah satunya mengembangkan program open data menjadi program yang lebih bermanfaat dan inovatif. Portal open data telah menyuguhkan sebanyak 680 dataset yang terdiri

atas berbagai macam topik dari seluruh satuan dan unit kerja di Pemerintahan DKI Jakarta. Portal ini menyuguhkan basis data yang sifatnya akurat, terbuka, terpusat, dan terintegrasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 181 Tahun 2014.

Website jakarta.go.id mendapatkan penilaian terkait kemudahan akses informasi dengan nilai yang cukup tinggi, yaitu sebesar 73,2% pada tahun 2016. Dari ke-13 subindikator mengenai kemudahan akses informasi, website ini telah memenuhi sebanyak 10 subindikator, antara lain adanya fitur menu, search engine; adanya site map; adanya layanan permintaan informasi secara online; menyajikan informasi dalam format pdf; tersedianya petunjuk mengenai permintaan informasi; menyediakan layanan unduh file; portal terkait yang mudah ditemukan; portal yang dapat diakses melalui gadget yang berbeda; adanya sign up untuk mengunduh file dan pelayanan pengaduan kanal. Subindikator mengenai kemudahan akses informasi yang masih belum terpenuhi yaitu akses pengaturan warna serta aksesibilitas untuk mengganti website jakarta.go.id menjadi berbasis bahasa inggris (Puspitasari & Harsasto, 2019).



Gambar 1. Portal Jakarta *Open Data*

Kerja Humas Pemerintah Pemprov DKI Jakarta

Melalui pernyataan yang dikemukakan oleh humas Kemendagri bahwa sebuah lembaga harus membangun goodwill antara publik dengan lembaga maupun sebaliknya menunjukkan bahwa Humas Pemprov DKI Jakarta telah sesuai dengan tugas Humas Pemerintah.

Humas pemerintah menjalankan salah satu fungsi pokoknya yakni dengan menyebarkan informasi mengenai kebijakan dan program Pemerintah melalui menjaga aliran informasi yang efektif. Dengan upaya tersebut, lembaga pemerintah dapat mengkomunikasikan informasi mengenai kebijakan dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat pada akhirnya masyarakat akan mendukung berbagai kebijakan dan program yang dibuat oleh Pemerintah. Sebagai garda terdepan dalam instansi pemerintahan, humas pemerintah harus menguasai aliran informasi yang sedang berkembang di instansinya. Bahkan tidak menutup kemungkinan humas pemerintah harus lebih proaktif mencari informasi baik yang berada di dalam organisasi maupun apa yang berkembang di publik. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Muhadjir selaku Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam mewujudkan good governance, Humas Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publiknya, salah satunya melalui akses informasi publik. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Pusat mendorong setiap Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Selama ini dalam mengakses informasi publik, masyarakat sering

mendapat masalah dan harus melalui birokrasi yang rumit. Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah tentunya harus ada keterlibatan unsur publik dan swasta, yang akan mempengaruhi suatu perencanaan kota, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran di Provinsi DKI Jakarta.

Kehadiran *Open Government* merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong kemudahan, efisiensi, dan efektivitas dalam mengakses informasi publik. Salah satunya melalui *Open Data*, untuk mewujudkan *Open Government*. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia, telah mengimplementasikan *Open Data* melalui Portal Data Jakarta yang beralamat di data.jakarta.go.id. Dalam Portal Data berisi 114 organisasi yang terdiri dari 22 departemen, 11 instansi, 10 Biro, 5 Pemerintah Kota, 1 Kabupaten Kepulauan Seribu, 1 Inspektorat, 1 Sekretariat DPRD, 1 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2 Dinas Pariwisata, 1 RSUD, 12 Kelurahan, dan 45 Kelurahan. Namun, dalam pengumpulan organisasi di Data Jakarta tidak semua organisasi memasukkan data pada Jakarta Portal dan dari yang telah dikonfirmasi oleh Diskominfo seperti itu pasti data kependudukan, secara langsung dikoordinasikan kepada Dinas dan/atau Walikota wilayah administrasi.

Implementasi Kebijakan Program Jakarta Open Data Terhadap Informasi Publik

Data merupakan potensi dan keberadaan yang akan selalu digunakan sesuai dengan kepentingan penggunaannya. Data dapat menjadi potensi keuntungan, tetapi data juga dapat dikelola sedemikian rupa sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan publik yang lebih baik untuk memecahkan masalah publik. Dalam fungsi ini tentunya kepentingan ini menjadi tugas pemerintah. Pemerintah juga harus mulai menjalankan pemerintahannya dengan memanfaatkan data. Portal Data Jakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui penyediaan data dan informasi. Proses peningkatan layanan tersebut adalah dengan mengevaluasi implementasi Portal Data Jakarta untuk mengetahui apa saja target yang telah dicapai dan kendala apa saja yang ditemui untuk percepatan kegiatan pada periode selanjutnya. Dalam perspektif tata kelola yang dinamis, implementasi open data di Provinsi DKI Jakarta perlu dikaji secara kritis melalui kemampuan berpikir ulang. Berpikir kembali adalah kemampuan membuka diri untuk melihat secara komprehensif kebijakan yang telah dilakukan untuk dievaluasi dan didesain ulang dalam rangka peningkatan kualitas, perbaikan kebijakan dan memaksimalkan pencapaian tujuan (Neo & Chen, 2007). Menurut hasil telaah dan observasi dokumen, upaya berpikir ulang dalam penerapan open data masih belum optimal.

Adanya pemenuhan prinsip ketersediaan informasi menjadi salah satu indikator dari berjalannya suatu pemerintahan yang baik, hal ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang transparan. Data-data yang dimiliki pemerintah ini, disuguhkan kepada masyarakat dalam website www.jakarta.go.id secara transparan, sehingga siapapun yang ingin mengakses data tersebut maka dapat diakses melalui laman website tersebut. Dalam rangka penilaian dan pemenuhan indikator transparansi yang dihasilkan melalui pengamatan dalam ketersediaan informasi pada program open data ini, diketahui telah terdapat 17 subindikator dari 21 subindikator yang ada, 2 subindikator belum tersedia dan 2 subindikator lainnya masih belum lengkap. Subindikator yang telah tersedia sudah berisikan informasi wajib yang diumumkan secara berkala, informasi mengenai kinerja hingga informasi pengadaan sudah tersedia dalam subindikator tersebut. Informasi terkait hal yang wajib diumumkan seperti bencana alam dan bencana sosial sudah diumumkan secara serta merta, dari ke-7 informasi dasar portal pemerintah hanya 2 subindikator yang tidak tersedia, yaitu informasi mengenai profil DPRD dan potensi investasi daerah. Kedua informasi tersebut merupakan informasi yang paling umum dicari oleh masyarakat, namun sayangnya website jakarta.go.id masih belum menyediakan terkait informasi tersebut.

Website jakarta.go.id suda memiliki 5 dari 8 fitur interaksi, yaitu adanya komunikasi e-mail; help pages; problem solving; forum; serta fitur kanal pengaduan yang dapat digunakan sebagai media interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Website ini juga memanfaatkan media sosial sebagai kanal pengaduan masyarakat, selain fitur balai warga dan Laporan! pemerintah juga menggunakan facebook, twitter, dan e-mail dalam menampung pengaduan yang diberikan oleh masyarakat. Pemerintah melakukan pembaruan informasi dalam rangka meningkatnya pelayanan dalam penyampaian aspirasi publik, pada tahun 2018 dibuatlah CRM (Citizen Relationship Management). Fitur CRM meningkatkan penindaklanjutan aduan masyarakat secara signifikan, masyarakat menjadi lebih percaya dengan kinerja pemerintah.

Adanya program e-planning, mendukung adanya usaha transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui e-budget di Jakarta, dimana masyarakat dapat melihat langsung anggaran dan lingkungan keuangan. Kebijakan yang dimulai dengan gagasan masing-masing RW, hal ini dapat membuktikan bahwa RW adalah sebagai kebijakan prioritas. Berdasarkan hasil survei, aplikasi e-musrenbang melengkapi empat (4) komponen: (1) tersedianya forum kebijakan, (2) adanya topik diskusi, (3) memberikan kesempatan masyarakat dalam memberikan dan memilih alternatif kebijakan, dan (4) tersedianya ruang diskusi terkait draft kebijakan. Masyarakat dapat mengunjungi aplikasi untuk mendapatkan informasi pembangunan di setiap daerah dan melaksanakan program bahkan mengunduh informasi anggaran yang dipublikasikan. Menurut Krina P., informasi dan keterbukaan ini meliputi fakta dan analisis tentang keputusan kebijakan, justifikasi keputusan administratif, informasi biaya, tujuan dan informasi pelayanan publik, serta proses pengajuan pengaduan dan pengaduan. Dalam hal ini terlihat bahwa transparansi kebijakan telah memberikan implementasi yang baik karena fitur e-musrenbang dan anggaran Jakarta.com dapat memberikan komentar atau saran.

Implementasi Kebijakan Program Jakarta Open Data Dilihat Dari *Competency Drivers*

Pemilihan Staf: Jumlah staf yang dimiliki oleh Unit Open Data Jakarta berjumlah sepuluh orang, dengan 8 orang di antaranya adalah staf ahli dan dua orang pegawai negeri sipil. Latar belakang pendidikan staf di Unit Open Data Jakarta tidak jauh berbeda. Dari sepuluh staf, hanya satu orang memiliki latar belakang pendidikan Diploma 3, sedangkan sisanya dari jenjang Sarjana. Proses pemilihan staf Unit Open Data Jakarta belum didasarkan pada analisis beban kerja dan kapasitas kerja. Beban kerja yang diterima oleh staf Unit Open Data Jakarta cukup besar, terutama pada Data Processing Officer. Petugas Pengolah Data yang berjumlah 6 orang tersebut harus berkoordinasi dengan 51 Satker di Provinsi DKI Jakarta, kemudian mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dengan format open data. Tidak hanya kekurangan sumber daya manusia, tetapi juga jangkauan data yang harus dikumpulkan sangat luas karena harus menjangkau daerah-daerah pemerintahan yang terpencil di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, pada saat pemilihan staf Unit Open Data Jakarta, selain kurangnya pengetahuan tentang open data, pengelola program juga tidak menjelaskan secara jelas tentang pekerjaan yang akan dilakukan dalam proses seleksi staf karena program open data merupakan program baru di Indonesia. Minimnya proses seleksi staf di Unit Open Data Jakarta menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu kurangnya pemahaman staf mengenai program yang akan dilakukan di awal-awal kerja. Selain itu, belum adanya analisis kapasitas kerja dan analisis beban kerja yang dilakukan mengakibatkan beban kerja yang besar bagi staf khususnya pada petugas pengolah data. Beban kerja yang terlalu tinggi ini mempengaruhi produktivitas pegawai dan juga menghambat pencapaian target publikasi data yang dicanangkan setiap tahunnya.

Pelatihan: Pelatihan yang diberikan untuk staf ahli di Unit Open Data Jakarta belum dilakukan secara rutin. Saat ini pelatihan baru diadakan satu kali selama pelaksanaan program Jakarta Open Data sejak tahun 2015. Padahal dengan minimnya sumber daya manusia di Unit

Open Data Jakarta, maka diperlukan pelatihan secara berkala untuk menjaga produktivitas staf. Selain itu, pelatihan belum diberikan kepada seluruh staf ahli di Unit Open Data Jakarta. Hal ini menyebabkan pemahaman para staf dan ahli belum merata tentang Open Data itu sendiri. Selain itu, transfer knowledge antara petugas pengolah data di Unit Open Data Jakarta dengan petugas data di Satker belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena seringnya terjadi perubahan data Liaison Officer di Satker. Kurangnya pelatihan ini secara langsung mempengaruhi pengetahuan dan produktivitas staf mengenai data terbuka. Staf di Unit Open Data Jakarta berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda dan memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan open data.

Pelatihan: Unit Data Terbuka Jakarta tidak memiliki pelatih khusus untuk memahami data terbuka. Pembinaan para tenaga ahli di Unit Open Data Jakarta tidak berjalan secara rutin. Pembinaan rutin diperlukan untuk menjaga keterampilan staf dalam melaksanakan program. Dalam pelaksanaan program open data, sesi coaching lebih banyak dilakukan dalam bentuk pembekalan yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh ketua program. Sesi pembinaan belum memberikan masukan kepada praktisi dalam pelaksanaan program selama ini.

Penilaian Kinerja: Penilaian kinerja staf ahli di Unit Open Data Jakarta telah dilakukan secara transparan. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala dan menggunakan sistem informasi yang disebut Sistem Informasi Tenaga Ahli (SINTA) sehingga memudahkan Kepala Layanan Informasi Publik untuk memantau. Penilaian kinerja di internal Unit Open Data Jakarta dilakukan setiap enam bulan sekali. Item utama untuk dinilai adalah beberapa kumpulan data yang dapat dipublikasikan setiap hari oleh petugas pengolah data. Adanya penilaian kinerja ini memungkinkan Kaprodi untuk mengukur pencapaian selama pelaksanaan program. Apabila ditemukan kekurangan kinerja tenaga ahli khususnya yang berkaitan dengan pencapaian kuantitas data, maka Ketua Program dapat mendorong lebih banyak tenaga ahli untuk meningkatkan kinerjanya. Staf atau tenaga ahli yang tidak mencapai kuantitas data yang harus dipublikasikan akan mendapatkan Surat Peringatan. Surat tersebut akan diberikan hingga tiga kali dan jika gagal meningkatkan kinerja maka akan terjadi pemutusan kontrak.

Implementasi Kebijakan Program Jakarta Open Data Dilihat Dari *Organization Drivers*

Administrasi Fasilitatif: Ketua Jakarta Open Program Data dapat memfasilitasi kebutuhan tenaga ahli. Beberapa permasalahan yang selama ini dapat difasilitasi dengan baik oleh pengelola program antara lain membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di bidang administrasi dan birokrasi yang dihadapi oleh pelaksana program open data seperti proses koordinasi dengan Satker di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Ketua Program dapat menganalisis masukan dari staf untuk perbaikan pelaksanaan program. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh tenaga ahli dapat diproses dengan cepat Kaprodi. Namun, saat ini kebutuhan yang dapat difasilitasi masih terkait dengan administrasi dan birokrasi, belum sepenuhnya menjadi rekomendasi perbaikan *driver implementasi*.

Sistem Data Pendukung Keputusan: *Jakarta Open Data* Unit telah memiliki sistem data pendukung yang dapat membantu kinerja staf dan pimpinan program. Semua data yang dibutuhkan dikelompokkan ke dalam satu sistem yang dapat diakses oleh tenaga ahli dengan mudah karena menggunakan teknologi sistem informasi. Dengan data tersebut, staf ahli dapat melihat sejauh mana proses data berjalan. Sistem data pendukung yang dimiliki oleh *Jakarta Open Data* Unit dapat membantu staf ahli dalam pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Tidak hanya data laporan yang berkaitan dengan pengolahan data dari Satker, namun ketua program juga memberikan data lain yang dibutuhkan seperti laporan tahunan. Hal ini dimaksudkan agar ahli mengetahui masalah dan solusi di tahun-tahun

sebelumnya. Laporan implementasi tahun ini dapat membantu ahli untuk mengidentifikasi dan menemukan solusi jika terjadi masalah selama implementasi program.

Intervensi Tingkat Sistem: pelaksanaan program *Jakarta Open Data* membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menyukseskan implementasinya. Dukungan tersebut berasal dari sumber data yang tersedia hingga regulasi yang mengatur pelaksanaan program. Unit Open Data Jakarta bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk mengumpulkan data yang mereka miliki dan menjadikannya sebagai format data terbuka. Badan Perencanaan Pembangunan di Sub-Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi data sebelum dipublikasikan di website *Jakarta Open Data*.

Kendalanya adalah kurangnya kepedulian Satker terhadap data yang dimiliki sehingga menghambat pelaksanaan program. Ketidaktahuan ini ditemukan dari tingkat pengelola data Satker di mana unit yang sama terkadang kesulitan meminta data yang dibutuhkan untuk dipublikasikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, per tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mendukung Unit Open Data Jakarta untuk mengeluarkan *Key Performance Indicator* yang ditujukan kepada setiap kepala Satker. Insentif setiap kepala SKPD akan dikurangi jika tidak mencapai target kuantitas data yang harus dipublikasikan. Penyediaan *Key Performance Indicator* oleh Bappenas Provinsi DKI Jakarta selama ini dapat meningkatkan minat kepala Satker terhadap datanya. Kerjasama lain yang dilakukan oleh *Unit Open Data* Jakarta adalah dengan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Kerjasama tersebut dimulai dari tahapan perancangan tindakan perencanaan *Open Government* Indonesia.

Staf Kantor Kepresidenan RI menjadi fasilitator antara pemerintah pusat dan daerah terkait implementasi Rencana Aksi *Open Government* Indonesia termasuk implementasi program open data. Jika ada kendala dalam pelaksanaannya, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia akan membantu daerah untuk meningkatkan pelaksanaannya. Kerjasama lebih lanjut adalah mengenai sistem yang digunakan dalam website *Jakarta Open Data*. Sistemnya sama dan disesuaikan dengan sistem yang dimiliki oleh *open data* website pemerintah pusat.

Implementasi Kebijakan Program Jakarta Open Data Dilihat Dari *Leadership Drivers*

Kepemimpinan Teknis: Kepala program memiliki diberikan arahan khusus dalam memecahkan masalah teknis dalam pelaksanaan program. Ketua program terlibat aktif dalam menangani permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program *Jakarta Open Data*. Masalah yang muncul dapat diselesaikan tanpa meminta saran dan solusi dari posisi yang lebih tinggi, seperti kepala bidang dan kepala instansi. Tenaga ahli juga merasa terbantu dengan baik ketika menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa permasalahan yang terjadi adalah pembagian fokus Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik menjadi 2 unit yang berada di bawah tanggung jawabnya, yaitu untuk Unit *Open Data* Jakarta dan Unit Pengelola Informasi & Dokumentasi.

Kepemimpinan Adaptif: Kepala program dapat membuat konsensus bersama ketika menghadapi masalah selama pelaksanaan program. Ketua program beberapa kali mengadakan pertemuan dan *focus group discussion (FGD)* yang melibatkan seluruh staf. Pertemuan tersebut diadakan tidak hanya untuk mengevaluasi pelaksanaan program, tetapi juga untuk memenuhi beberapa kebutuhan tenaga ahli selama pelaksanaan. Selain itu, gedung komunikasi berjalan dengan baik. Proses pengambilan keputusan pada akhirnya melibatkan staf dan tenaga ahli di Unit Open Data Jakarta. Keterlibatan staf dalam setiap keputusan pembuatan dapat mendorong kepercayaan staf kepada kepala program. Namun pertemuan dan FGD yang telah dilakukan selama ini tidak terlalu sering, hanya diadakan jika ada informasi yang mendesak bagi para staf.

SIMPULAN

Untuk menjadikan Jakarta sebagai *Smart City*, Humas telah membuat portal data yang menyajikan informasi dari Pemprov DKI Jakarta secara bertanggung jawab dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. *Open data* adalah tentang membuat informasi tersedia untuk publik sebanyak mungkin, dan pemerintah ingin memberikan gambaran tentang upaya pemerintah hingga saat ini. Keterbukaan informasi tidak hanya dapat mengefektifkan kerja pemerintah, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik, termasuk pengembangan program open data menjadi program yang bermanfaat dan inovatif.

Beberapa fitur dari beberapa layanan informasi publik dan kebijakan transparansi di situs jakarta.go.id antara lain, pertama, kejelasan dan konsistensi seputar tujuan seperti inovasi dalam melacak komentar dan keinginan publik. Dengan adanya undang-undang pelaksana pembentukan dan rekrutmen aparat penegak, fungsi koalisi berubah menjadi dinas subdivisi (tingkat kota/kabupaten) masing-masing di tingkat kabupaten pusat. Ketiga, mendukung proses kebijakan alokasi anggaran yang telah ditambahkan setiap tahun ke situs website Pemprov DKI Jakarta sejak tahun lalu. Keempat, mendukung proses politik, yaitu dari sisi alokasi anggaran, setiap tahun mengalami peningkatan sejak tahun lalu sejak dikelolanya situs website Pemprov DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. M. (2019). Social cognitive theory: A Bandura thought review published in 1982-2012. *Psikodimensia*, 18(1), 85–100.
- Alfansyur, A., & Mariyani, N. (2020). SENI MENGELOLA DATA: PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK, SUMBER DAN WAKTU PADA PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Ardina, M., & Saharuddin, E. (2021). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 49–61.
- Astuty, S., S., Y., Maulina, N., & Hanief, L. (2017). Analisis Fungsi dan Peran Humas Dalam Upaya Implementasi Good Governance. *Jurnal of Communication Studies*, 2(1), 100–118.
- Hidayat, R. (2020). Langkah-langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi COVID-19 di Lembaga Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 9(1), 43–55.
- Hikmat, M. M. (2013). *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Kominfo. (2016). Humas pemerintah harus jadi andalan.
- Paradesa, R. (2015). Kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa melalui pendekatan konstruktivisme pada matakuliah matematika keuangan. *Jurnal Pendidikan Matematika RAFA*, 1(2), 306–325.
- Pratama, B., & Ari, D. (2021). Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik. *Surya Abdimas*, 5(3), 312–321.
- Puspitasari, A. E., & Harsasto, P. (2019). Penerapan Transparansi Melalui Website (www.jakarta.go.id) Pemerintah Provinsi Dki Jakarta (Periode Tahun 2017-2018). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(2), 91–100.
- RI, K. P. A. N. dan R. B. *Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah*. , (2011).
- Ridha, N. (2017). Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian. *Hikmah*, 14(1), 62–70.
- Saheb, S., Slamet, Y., & Zuber, A. (2018). Peranan Modal Sosial Bagi Petani Miskin Untuk

- Mempertahankan Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Di Pedesaan Ngawi (Studi Kasus Di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1), 17–34.
- Sani, A., Hidayat, M., & Sjaifrah, N. A. (2020). Pemahaman Petugas Kehumasan Kementerian Dalam Negeri Tentang Peran Humas Pemerintah. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 4(2), 215. <https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.23528>
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance Melalui Pelayanan Pulik. *JIPSI: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1), 1–17.
- Sosiawan, E. A. (2015). Evaluasi Implementasi e-government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Indonesia: Perspektif Content dan Manajemen Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF). *Seminar Nasional Informatika*, 1(5).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, M. K. (2017). Strategi Alternatif Memajukan Lembaga Pendidikan Islam di Pedesaan Berbasis Sekolah Excellent Perspektif Kompetitif Kotemporor. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 7769–7776.
- Yanti, N., Adawiah, R., & Matnuh, H. (2016). Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka pengembangan nilai-nilai karakter siswa untuk menjadi warga negara yang baik di sma korpri banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 963–970.
- Zellatifanny, C., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.